

Anggota DPR RI Johan Rosihan: Jangan Ada Lagi Pemotongan Anggaran Sektor Pertanian secara Sepihak

Tony Rosyid - INDONESIASATU.CO.ID

Jun 1, 2021 - 08:47



Anggota DPR RI Johan Rosihan

JAKARTA - Usai mendengarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Anggota DPR RI Johan Rosihan merasa pemerintah masih

kurang memperhatikan sektor pertanian. Johan mengatakan, sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang tetap eksis dalam masa pandemi Covid-19.

“Tetapi dalam dua pembahasan terakhir, APBN kita selalu mengalami potongan secara sepihak oleh pemerintah. Karenanya melalui kesempatan (Rapat Paripurna) ini agar tidak terjadi lagi pemotongan anggaran secara sepihak pada sektor pertanian. Karena dampaknya pada menurunnya produksi kita. Saya mengingatkan pesan Bung Karno bahwa pangan itu merupakan hidup matinya suatu bangsa,” ucap Johan dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Ia menegaskan, sektor pertanian tidak hanya bicara tentang produksi atau stok saja, tetapi menyangkut soal kedaulatan negara. “Saya mencatat bahwa pemerintah tidak memiliki spirit untuk melakukan swasembada pangan dan selalu berencana untuk melakukan impor pangan meski terus mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu terkait rencana mogoknya UMKM pembuat tahu dan tempe, Johan menyatakan bahwa kejadian seperti ini masih berulang persis dalam satu semester. Pada Akhir 2020, tepatnya awalnya Januari 2021 petani kedelai UMKM pembuat tahu dan tempe sudah melakukan mogok, dan hari ini mereka juga berencana untuk mogok.

“Kalau ini terjadi, maka sesungguhnya Pemerintah Presiden Joko Widodo tidak melakukan antisipasi. Padahal ketika awal tahun 2021 Presiden telah menyampaikan bahwa akan menyelesaikan persoalan (stok kedelai) ini dan kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pertanian, dalam dua musim tanam saja. Ini sudah masuk musim kedua dan tidak ada tanda-tanda perbaikan.” urainya.

“Melalui forum ini kami meminta kepada pemerintah agar menjadikan kedelai sebagai salah satu bahan pokok strategis yang mengalami perlindungan, baik dari sisi harga maupun dari sisi mutunya. Sehingga pandemi ini tidak membuat UMKM pembuat tahu dan kedelai serta sektor-sektor pangan yang lain mengalami kemunduran, bahkan bangkrut,” imbuhnya. (dep/es)